

**ANALISIS PENGARUH DIVERSITAS DEWAN
DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DAN
KARAKTERISTIK PERUSAHAAN TERHADAP
LUAS PENGUNGKAPAN *CORPORATE*
*GOVERNANCE***

(Studi Empiris Bank Syariah)



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

TYA SETYAWATI SUPRIYANTO

NIM. 12030110120104

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Tya Setyawati Supriyanto

Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120104

Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi

Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH DIVERSITAS
DEWAN DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS DAN KARAKTERISTIK
PERUSAHAAN TERHADAP LUAS
PENGUNGKAPAN *CORPORATE
GOVERNANCE*
(*Studi Empiris Bank Syariah*)**

Dosen Pembimbing : Fuad, SET., M.Si., Ph. D.

Semarang, 16 September 2014

Dosen Pembimbing,

(Fuad, SET., M.Si., Ph. D.)
NIP. 19790916200812

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Tya Setyawati Supriyanto
Nomor Induk Mahasiswa : 12030110120104
Fakultas/ Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/ Akuntansi
Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Diversitas Dewan
Direksi Dan Dewan Komisaris Dan
Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas
Pengungkapan *Corporate Governance*
(Studi Empiris pada Bank Syariah)

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 30 September 2014

Tim Penguji

1. Fuad, SET., M.Si., Ph. D. (.....)
2. Dr. Endang Kiswara, S.E., M.Si., Akt (.....)
3. Drs. Dul Mu'id, SE., M.Si., Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini saya, Tya Setyawati Supriyanto, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Pengaruh Diversitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance (Studi Empiris Bank Syariah)* adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut diatas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 16 September 2014

Yang membuat pernyataan,

(Tya Setyawati Supriyanto)

NIM: 120301101204

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

✚ *Jadikanlah sabar dan tegakkanlah sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.*

(Q.S Al-Baqarah: 153)

✚ *Sewaktu aku masih muda, bebas dan imajinasiku tak terbatas, aku bermimpi mengubah dunia. Aku menemukan bahwa dunia ini tidak akan berubah. Aku memperpendek ingatanku dan memutuskan untuk mengubah sekitarku saja. Tapi kelihatannya itu pun tak tercapai. Setelah tumbuh dewasa, setelah suatu usaha yang gagal, aku memutuskan untuk hanya mengubah keluargaku saja, orang-orang yang dekat denganku, tapi sialnya mereka pun tidak berubah. Sekarang, waktu aku terlentang diranjang kematian, tiba-tiba kusadari. Jika aku mengubah diriku terlebih dahulu, maka sebagai contoh aku dapat mengubah keluargaku. Dari inspirasi dan dukungan mereka, aku dapat memperbaiki negeriku dan siapa tahu, aku bahkan dapat mengubah dunia.*

(Danclark, Whethering the Strom)

PERSEMBAHAN:

1. Kedua orang tua, Ibu dan Bapakku tersayang, terima kasih atas kasih sayang dan dorongannya.
2. Kedua adikku, Dewi dan Doni.
3. Almamater Universitas Diponegoro Semarang.

ABSTRACT

This study aims to analyze the factors that affect the extensive disclosure of corporate governance to sharia commercial bank in Indonesia. This study is a replication from the study of Salim Darmadi. The difference of this study with previous study is in this study adds the variable of gender diversity and educational background, blockholder ownership, and profitability. Salim Darmadi only explains how the implementation of corporate governance practices in sharia commercial bank without analyzing the factors that affect the extensive disclosure of corporate governance. The independent variables that using in this study are gender diversity from board of commissioner and directors, educational background diversity from board of commissioner and directors, blockholder ownership, and profitability, while the dependent variables are the extensive disclosure of corporate governance. Company size, company age, and public accounting firm are control variable.

The population of this research is the sharia commercial bank in Indonesia among period of year 2008-2012. The gathering for sample uses pooling technique. This study obtains samples from 40 companies using pooling data method. The method of analysis that using to test the effect of independent variables on the dependent variable is the Ordinary Least Square (OLS).

The results of this study find the influence of gender diversity of board of directors and educational background diversity with the extensive disclosure of good corporate governance. As for the variable gender diversity of the board of commissioners, blockholder ownership, and profitability do not have any influence the extensive disclosure of good corporate governance.

Keywords: corporate governance, gender diversity, educational background diversity, blockholder ownership, and profitability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* pada perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Salim Darmadi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulunya yaitu pada penelitian ini menambahkan variabel diversitas gender dan latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder*, dan profitabilitas. Salim Darmadi hanya menjelaskan bagaimana penerapan praktik *corporate governance* di perbankan syariah tanpa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance*. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah diversitas *gender* dewan komisaris dan direksi, diversitas latar belakang pendidikan dewan komisaris dan direksi, kepemilikan *blockholder*, dan profitabilitas sedangkan variabel dependennya adalah luas pengungkapan *corporate governance*. Ukuran perusahaan, umur perusahaan dan kantor akuntan publik sebagai variabel kontrol.

Populasi dari penelitian ini adalah perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2008-2012. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *pooling data*. Penelitian ini memperoleh sampel sebanyak 40 perusahaan dengan metode *pooling data*. Metode analisis yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah *Ordinary Least Square (OLS)*.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa adanya pengaruh diversitas *gender* dewan direksi dan diversitas latar belakang pendidikan dewan komisaris dengan luas pengungkapan *good corporate governance*. Sedangkan untuk variabel diversitas *gender* dewan komisaris, kepemilikan *blockholder*, dan profitabilitas tidak memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *good corporate governance*.

Kata kunci: *corporate governance*, diversitas *gender*, diversitas latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder*, dan profitabilitas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Diversitas Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dan Karakteristik Perusahaan Terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance (Studi Empiris Bank Syariah)*”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang. Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, petunjuk, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Drs.H. Mohamad Nasir, M.Si., Akt, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof.Dr. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt selaku Ketua Jurusan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
3. Fuad, SET., M.Si., Ph. D. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan saran, bimbingan, serta pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Aditya Septiani, S.E., M.Si., Akt selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro yang telah membantu selama proses perkuliahan.

7. Kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materi, semangat dan doa.
8. Untuk adikku tersayang Dewi dan Doni yang telah menemani dan menghibur penulis dalam pembuatan skripsi ini.
9. Satu Jiwa (Rofikoh, Fitri, Sabtari, Keken, dan Pretty), Hendriansyah, Novia, Lita, Ani, Marlina dan teman-teman kuliahku di FEB UNDIP Akuntansi R1 2010 yang memberikan semangat dalam proses skripsi dan pengalaman yang mewarnai hari-hari penulis.
10. Kis yang mengajarku mengenai SPSS.
11. Satu kelompok anak bimbingan Pak Fuad yang memberikan info-info mengenai jadwal bimbingan.
12. Teman-teman Akuntansi 2010 lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
13. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, 16 September 2014

Penulis

Tya Setyawati Supriyanto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRACT.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4 Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu.....	13
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	14

2.1.2	<i>Good Corporate Governance</i>	15
2.1.3	Perbankan Syariah.....	17
2.1.4	<i>Corporate Governance</i> di Laporan tahunan.....	19
2.1.5	Pentingnya <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Syariah.....	21
2.1.6	Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> di Bank Syariah.....	24
2.1.7	Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	24
2.1.7.1	Diversitas anggota Dewan Komisaris dan Direksi.....	24
2.1.7.1.1	Diversitas <i>Gender</i>	26
2.1.7.1.2	Diversitas Latar Belakang Pendidikan.....	28
2.1.7.2	Kepemilikan <i>Blockholder</i>	29
2.1.7.3	Profitabilitas.....	30
2.2	Penelitian Terdahulu.....	31
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis.....	36
2.4	Hipotesis.....	36
2.4.1	Diversitas <i>Gender</i>	36
2.4.2	Diversitas Latar Belakang Pendidikan.....	38
2.4.3	Kepemilikan <i>Blockholder</i>	39
2.4.4	Profitabilitas.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....		41
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	41

3.1.1	Variabel Dependen.....	41
3.1.2	Variabel Independen.....	42
3.1.2.1	Diversitas dewan komisaris dan direksi.....	42
3.1.2.1.1	Diversitas gender.....	42
3.1.2.1.2	Diversitas latar belakang pendidikan.....	42
3.1.2.2	Kepemilikan <i>Blockholder</i>	43
3.1.2.3	Profitabilitas.....	43
3.1.2	Variabel Kontrol.....	43
3.1.3.1	Umur.....	43
3.1.3.2	<i>Size</i>	44
3.1.3.3	Kantor Akuntan Publik.....	44
3.2	Populasi dan Sampel.....	45
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	46
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	46
3.5	Metode Analisis Data.....	46
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	46
3.5.2	Uji Asumsi Klasik.....	47
3.5.2.1	Uji Multikolonieritas.....	47
3.5.2.2	Uji Heteroskedastisitas.....	48
3.5.2.3	Uji Autokorelasi.....	48
3.5.2.4	Uji Normalitas.....	49
3.5.3	Analisis Regresi Berganda.....	50
3.5.4	Uji Hipotesis.....	51

3.5.4.1 Koefisien Determinasi (R^2).....	51
3.5.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F).....	51
3.5.4.3 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	52
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	53
4.1 Gambaran Umum Sampel Perusahaan.....	53
4.2 Analisis Data.....	54
4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif.....	54
4.2.2 Uji Asumsi Klasik.....	55
4.2.2.1 Uji Heteroskedastisitas.....	55
4.2.2.2 Uji Autokorelasi.....	56
4.2.2.3 Uji Normalitas.....	58
4.2.2.4 Uji Multikolonieritas.....	59
4.3 Persamaan Regresi Berganda.....	60
4.3.1 Uji Signifikan Simultan (Uji Statistik F).....	61
4.3.2 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t).....	62
4.3.3 Uji koefisien determinasi (R^2).....	63
4.4 Pengujian Hipotesis.....	64
4.5 Interpretasi Hasil.....	68
4.5.1 Pengaruh diversitas <i>gender</i> terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	68
4.5.1.1 Pengaruh diversitas <i>gender</i> Direksi terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	68

4.5.1.2 Pengaruh diversitas <i>gender</i> Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	69
4.5.2 Pengaruh diversitas latar belakang pendidikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	71
4.5.2.1 Pengaruh diversitas latar belakang pendidikan Direksi terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	71
4.5.2.2 Pengaruh diversitas latar belakang pendidikan Dewan Komisaris terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	72
4.5.3 Pengaruh kepemilikan <i>blockholder</i> terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i>	73
4.5.4 Pengaruh profitabilitas terhadap luas pengungkapan <i>corporate</i> <i>governance</i>	74
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Keterbatasan penelitian.....	78
5.3 Saran.....	78
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN – LAMPIRAN.....	82

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	35
Tabel 3.1 Tabel Definisi Operatif Variabel	45
Tabel 4.1 Populasi Penelitian	53
Tabel 4.2 Statistik Deskriptif	54
Tabel 4.3 Hasil Uji Park	56
Tabel 4.4 Uji Autokorelasi	57
Tabel 4.5 Run test	57
Tabel 4.6 Uji statistik <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (K-S)	58
Tabel 4.7 Uji Multikolonieritas	59
Tabel 4.8 Model Persamaan Regresi Berganda	61
Tabel 4.9 Hasil Uji Statistik F	62
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t	63
Tabel 4.11 Koefisien Determinasi (R^2)	64
Tabel 4.12 Hasil Pengujian Hipotesis	64
Tabel 4.13 Ringkasan Hasil Hipotesis Penelitian	67

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A Daftar Bank Umum Syariah.....	82
Lampiran B Daftar Item Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	83
Lampiran C Hasil Analisis Regresi.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai sebuah negara yang perekonomiannya terbuka, tak luput dari dampak krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang tak lain disebabkan oleh kegagalan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*). Kegagalan dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tersebut meliputi sistem hukum yang kurang memadai, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, praktek perbankan yang lemah, serta pandangan *Board of Directors* (BOD) yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas. Daniri (2005) menjelaskan bahwa *good corporate governance* (GCG) merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang yang sekaligus dapat memenangkan persaingan bisnis global. Karena para *stakeholder* meyakini bahwa dengan adanya pengungkapan *good corporate governance* yang akurat, tepat waktu dan transparan dapat menambah nilai bagi para *stakeholder*.

Menurut *Cadbury Commite* (1992), *Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggungjawabannya kepada para *stakeholder*. Sedangkan, menurut Lannoo (dikutip dari Algaoud dan Lewis, 2003), *Corporate Governance* didefinisikan

sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara menyeluruh yang ditetapkan secara internal dan eksternal dari suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders*. Di Indonesia Daniri (2005, hal.8), *Good Corporate Governance* didefinisikan sebagai:

“Suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku.”

Beberapa komunitas internasional seperti *Standard&Poor*, *CLSA*, *Pricewaterhouse Coopers*, *Moody's Morgan Stanley*, dan *Calper's* menempatkan Indonesia pada posisi terbawah dalam rating implementasi GCG. Sedangkan, negara Singapura menempati posisi teratas dalam Laporan *Corporate Governance in Asia (2004) Continuing Under Performance* oleh *CLSA*. Rendahnya implementasi GCG yang ada di Indonesia ini disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu penegakan hukum dan budaya *corporate governance* yang masih rendah dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia. Terbukti dengan adanya krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir tahun 1990-an, yang mengakibatkan banyak bank harus dilikuidasi dan menyebabkan terjadinya kredit macet pada lembaga perbankan di Indonesia.

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan (*corporate governance*) memiliki tingkatan yang lebih tinggi karena bank signifikansi memobilisasi tabungan masyarakat, artinya tergantung pada kepercayaan publik (Darmadi, 2013). Karena perbankan memiliki *stakeholder* yang lebih beragam

maka informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara transparan dan bebas dari rekayasa yang artinya bahwa informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan fakta yang ada dan masih relevan.

Di Indonesia, kasus bank bermasalah yang terkait dengan mekanisme *corporate governance* telah banyak terjadi. Pada awal tahun 2003, muncul kasus skandal laporan keuangan ganda Bank Lippo yang disebabkan oleh kurang transparansinya bank tersebut untuk mengungkapkan berapa besarnya laba bersih yang diterima oleh perusahaan. Seperti yang dimuat di media masa, kasus Bank Lippo muncul setelah bank diketahui mengeluarkan laporan keuangan per 30 September 2002 yang berbeda yaitu yang dikeluarkan di surat kabar pada 28 November 2002, yang disampaikan ke BEI pada 27 Desember 2002 dan yang disampaikan ke manajemen Bank Lippo 6 Januari 2003.

Selain kasus Bank Lippo, juga terdapat kasus kredit fiktif di Bank Syariah Mandiri yang terjadi di akhir tahun 2013. Kasus yang dilakukan oleh Kepala Cabang dan seorang *Account Officer* tersebut berhasil membobol dana nasabah hingga Rp 102 Miliar, yang dilakukan dengan cara membuat proposal kredit fiktif terhadap 197 nasabah. Menurut Endang Sedyadi selaku Direktur Direktorat Pengawasan Bank II Bank Indonesia (2011), kasus pembobolan bank yang terjadi di sejumlah bank disebabkan oleh ketidakpatuhan bank terhadap Prosedur Standar Operasional (*Standard Operating Procedure*; SOP). Dapat disimpulkan pula sistem pengawasan internal pada bank masih kurang berjalan secara optimal karena masih terdapat penyalahgunaan wewenang yang dilakukan

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Deputi Gubernur BI (2011), Halim Alamsyah mengatakan bahwa perbankan harus mengimplementasikan mekanisme *good corporate governance*. Karena di dalam *good corporate governance* terdapat prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran sehingga dengan mengoptimalkan mekanisme *corporate governance*, industri perbankan akan tetap mendapat kepercayaan publik.

Selain kedua kasus tersebut terdapat beberapa kasus lain seperti kasus L/C fiktif Bank BNI di tahun 2003, kasus Bank Century tahun 2008, kasus kredit fiktif Bank Jateng unit Syariah cabang Surakarta pada tahun 2012 dan kasus bank bermasalah lainnya yang membuktikan bahwa belum maksimalnya implementasi *corporate governance* di perbankan.

Dalam penelitian Darmadi (2013) tentang Praktik Pengungkapan *Corporate Governance: Exploratory Study* dalam Laporan Tahunan Bank Islam di Indonesia menunjukkan bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Syariah Mandiri (BSM) memiliki tingkat transparansi perusahaan, khususnya dalam mekanisme *corporate governance* yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah lainnya. Bahkan sejak tahun 2002, BSM telah memiliki Kode Etik yang mengacu pada *Akhlaqul Karimah* (Perilaku yang Baik) seperti yang dinyatakan dalam Laporan Tahunan Mandiri 2010, hal.109. Akan tetapi, jika melihat kasus yang terjadi pada Bank Syariah Mandiri tahun 2013 mengindikasikan bahwa masih adanya kesempatan untuk melakukan *fraud* atau

penyalahgunaan wewenang yang ada sehingga menimbulkan asimetri informasi yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk bertindak oportunistik. Dengan adanya mekanisme *good corporate governance* diharapkan dapat membatasi perilaku *opportunistic* manajer.

Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 mewajibkan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah untuk melaksanakan *good corporate governance* dalam setiap kegiatan usahanya. Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan secara umum juga mengatur ketentuan yang terkait dengan *Good Corporate Governance* termasuk didalamnya terdapat *Governance Structure*, *Governance Process* maupun *Governance Outcome*. Pengaturan tersebut terkait dengan syarat kepemilikan, Dewan Komisaris dan Direksi serta prinsip-prinsip kehati-hatian bank yang harus ditaati. Halim Alamsyah mengatakan bahwa Bank Indonesia (BI) akan melakukan peninjauan ulang terhadap struktur kepemilikan bank di Indonesia karena struktur kepemilikan berpengaruh terhadap performa perbankan. Pengaruh struktur kepemilikan terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang beragam.

Kepemilikan *blockholder* yang merupakan proksi dari struktur kepemilikan merupakan pemegang saham yang memiliki lebih dari lima persen dari seluruh modal atau ekuitas perusahaan. La Porta et al. (1998) berpendapat bahwa pemegang blok saham perusahaan atau pemegang saham pengendali dapat mengurangi masalah agensi antara agent dengan prinsipal. Marston dan Polei (2004) dalam Samaha,dkk (2011) berpendapat bahwa investor yang hanya

memiliki sebagian kecil saham perusahaan memiliki akses yang terbatas ke informasi tentang perusahaan. Dengan kata lain bahwa jika kepemilikan *blockholder* perusahaan lebih didominasi oleh manajer maka terdapat kemungkinan bahwa manajer akan mengungkapkan informasi yang lebih sedikit dalam laporan tahunan perusahaan karena manajer memiliki akses informasi yang luas tanpa harus melalui laporan tahunan perusahaan yang dipublikasikan. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham yang lebih tersebar maka perusahaan akan mengungkapkan informasi yang luas untuk memenuhi kebutuhan investor dan untuk mengawasi tindakan manajemen. Samaha,dkk (2011) menemukan persentase kepemilikan *blockholder* yang lebih rendah berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

Pemilihan dan penetapan suatu keputusan bisnis juga diperlukan sumber daya manusia yang memadai dari pihak-pihak pengambil keputusan dalam hal ini adalah dewan komisaris dan direksi yang merupakan organ perusahaan yang menjamin penerapan prinsip-prinsip *corporate governance*. Masalah penting dalam tata kelola perusahaan yang dihadapi dewasa ini adalah diversitas dalam jajaran dewan baik itu dewan komisaris atau direksi. Diversitas merupakan suatu perbedaan dan variasi atribut yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi dari segi fisik, sosial, kultural dan lain sebagainya. Mohammed Nor Raihan (2011) dalam Toyyibah (2013) menyebutkan bahwa keahlian, kepribadian, *learning style*, pendidikan, usia, etika, *gender*, etnisitas, masa jabatan, pengalaman, dan status ekonomi atau sosial merupakan contoh dari diversitas dewan komisaris dan dewan direksi.

Istilah *gender* digunakan untuk menjelaskan karakteristik antara pria dan wanita atau antara sifat-sifat feminim dan maskulin yang ada di dalam masyarakat. Dalam Toyyibah (2013) menyebutkan bahwa kesenjangan *gender* masih terjadi di level pemimpin dan eksekutif perusahaan dimana peranan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi ibarat piramida yang semakin kecil ke atas. Sesuai dengan hasil survei yang dilakukan oleh tim Riset SWA pada tahun 2011, jumlah direktur wanita di perusahaan perbankan hanya 64 orang dari total 382 direktur atau sekitar 16,75% dan jumlah direktur wanita di BUMN perusahaan publik tercatat lima orang dari total 99 direktur atau 5,5% saja (Rahayu et al. 2011 dalam Toyyibah, 2013).

Diversitas *gender* dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan merupakan salah satu hal penting bagi komposisi dewan secara keseluruhan. Hal tersebut disebabkan oleh kebutuhan perusahaan akan latar belakang pendidikan yang terus berubah seiring dengan perubahan waktu. Ponnu (2008) berpendapat bahwa *Board of Directors* seharusnya terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi dan keuangan, dan lain sebagainya sehingga memberikan perspektif yang bermanfaat terhadap penilaian resiko, keunggulan bersaing, dan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam bisnis. Sedangkan Alhabsi (1994) dalam Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa karakteristik personal seorang komisaris mempengaruhi praktik *disclosure*.

Penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan CG menunjukkan hasil yang beragam. Sudiartana (2013) meneliti tentang pengaruh diversitas *gender* dan latar belakang pendidikan dewan direksi terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI. Hasil menunjukkan bahwa diversitas *gender* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dan latar belakang pendidikan anggota dewan berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela.

Hikmah,dkk (2011) menemukan bahwa profitabilitas yang diukur dengan ROE terhadap luas pengungkapan tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Profitabilitas sendiri menggambarkan kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimana semakin tinggi profitabilitas maka perusahaan akan memberikan informasi yang lebih luas dalam laporan tahunannya (Singhvi dan Desai,1971 dalam penelitian Hikmah,dkk 2011).

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Darmadi (2013). Dimana penelitian sebelumnya hanya menjelaskan bagaimana penerapan praktik *corporate governance* di perbankan syariah yang kemudian memeringkat sampel penelitian tersebut berdasarkan nilai Indeks Pengungkapan *Corporate Governance* (IPCG) tanpa menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* diperbankan syariah. Untuk itu, penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu diversitas anggota dewan komisaris dan direksi yang di proksikan dengan *gender* dan latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder* dan profitabilitas sebagai faktor-faktor yang

mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* yang mana belum digunakan oleh Darmadi (2013) dalam penelitiannya. Selain itu dalam penelitian ini juga menambahkan variabel umur, *size* dan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai variabel kontrol serta waktu penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 5 tahun dari tahun 2008-2012 dengan menggunakan metode *Ordinary Least Squares (OLS)* dalam pengujian masing- masing hipotesis.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan karena dilihat dari sudut pandang *corporate governance*, perbankan syariah menunjukkan beberapa segi yang menarik. Archer et al. (dikutip oleh Darmadi,2013) menyebutkan selain mematuhi peraturan perbankan, bank syariah juga harus mematuhi hukum syariah. Algaoud dan Lewis (2003) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip Islam yang harus dianut oleh perbankan Islam, diantaranya adalah:

1. Larangan riba.
2. Menjalankan bisnis dan investasi berdasarkan aktivitas-aktivitas yang halal.
3. Transaksi harus bebas dari unsur *gharar*.
4. Zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat.
5. Adanya Dewan Syariah Khusus sebagai penyelian dan memberikan nasihat kepada bank mengenai kepatuhan suatu transaksi.

Menurut Algaoud dan Lewis (2003) , Ideologi keagamaan Islam akan bertindak sebagai mekanisme insentif untuk mengurangi inefisiensi yang

diakibatkan oleh informasi yang asimetri dan resiko moral. Seperti pernyataan Ayoub-Bey (1994) yang dikutip oleh Algaoud dan Lewis (2003, h.245):

“Perbankan Islam memiliki keunggulan intrinsik dalam hal (etika) ini karena Islam, melalui syariatnya mendorong dan mengharuskan kalangan industri, untuk terlibat dalam (dan memudahkan) perdagangan yang bertanggungjawab secara sosial, moral dan etika.”

Sehubungan dengan uraian di atas, penelitian ini berjudul **“Analisis Pengaruh Diversitas Dewan dan Karakteristik Perusahaan terhadap Luas Pengungkapan *Corporate Governance* (Studi Empiris pada Bank Syariah).”**

1.2. Rumusan Masalah

Informasi dalam Laporan Keuangan harus disajikan secara transparan dan bebas dari rekayasa dimana informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan tersebut harus sesuai dengan fakta yang ada dan masih relevan. Namun, pada saat terjadi krisis ekonomi di kawasan Amerika Latin dan Asia termasuk Indonesia banyak sekali laporan keuangan perusahaan yang dimanipulasi oleh jasa akuntan sehingga menimbulkan asimetri informasi yang memberikan kesempatan kepada manajer untuk memperoleh keuntungan pribadi. Krisis ekonomi yang terjadi pada akhir tahun 1990-an terjadi karena gagalnya penerapan *Good Corporate Governance* dimana sistem hukum yang kurang memadai, standar akuntansi dan audit yang tidak konsisten, dan praktik perbankan yang lemah serta pandangan *Board of Directors* yang kurang peduli terhadap hak-hak pemegang saham minoritas menyebabkan perekonomian Indonesia menjadi terpuruk.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti , yaitu :

1. Apakah diversitas *gender* dewan komisaris dan direksi memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
2. Apakah diversitas latar belakang pendidikan dewan komisaris dan direksi memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
3. Apakah kepemilikan *blockholder* memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?
4. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh diversitas *gender*, diversitas latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder*, dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan Perbankan Syariah.

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan bagi pembaca tentang luas pengungkapan *good corporate governance* pada perbankan Syariah.
- b. Meningkatkan kesadaran para pelaku bisnis tentang pentingnya penerapan praktik *good corporate governance*.
- c. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain yang akan menyusun skripsi atau melakukan penelitian tentang luas

pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan bank syariah.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan. Bab ini berisi tentang pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka. Bab ini berisi tentang pemaparan mengenai landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan penelitian, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran penelitian, dan hipotesis penelitian.

Bab III : Metode Penelitian. Bab ini berisi tentang variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : Hasil Dan Pembahasan. Bab ini menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan pembahasan.

Bab V : Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisi kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dan saran-saran penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan dipandang sebagai suatu versi dari *game theory* (Mursalim, 2005). Teori keagenan membahas hubungan antara manajemen (agent) dan pemegang saham (prinsipal) dimana agent bertanggungjawab untuk mengoptimalkan keuntungan prinsipal. Akan tetapi, manajer juga mempunyai kepentingan pribadi untuk memaksimalkan *utility*-nya.

Hubungan agensi muncul karena prinsipal mendelegasikan pertanggung jawaban dalam pengambilan keputusan kepada agent sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan informasi (asimetri informasi). Asimetri informasi timbul karena manajer sebagai pengelola perusahaan mengetahui lebih banyak informasi mengenai perusahaan baik itu kondisi internal perusahaan sampai dengan prospek perusahaan dimasa yang akan datang sehingga memberikan kesempatan manajer untuk bertindak oportunistis yaitu memperoleh keuntungan pribadi. Sedangkan, pada sisi prinsipal akan mengalami kesulitan dalam mengendalikan manajer dikarenakan prinsipal memiliki sedikit informasi mengenai perusahaan tersebut. Oleh karena itu, dalam pengelolaan perusahaan manajer perlu diawasi dan dikendalikan agar tidak terjadi kecurangan dan untuk

memastikan bahwa pengelolaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Michael Johnson (dikutip Daniri, 2005), teori agensi memandang bahwa manajemen akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingannya sendiri, bukan sebagai pihak yang arif dan bijaksana serta adil terhadap pemegang saham.

Seorang manajer yang mengemban amanat dari prinsipal maka manajer mempunyai kewajiban untuk menyampaikan amanat dan tidak menyalahgunakan amanat tersebut. Kewajiban menyampaikan amanat ini dapat dilihat dalam Surat (2) Al Baqarah ayat 28, Allah berfirman:

“Maka hendaklah (orang) yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) kepada yang berhak (yang berpiutang).”

Dan sebagaimana sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang menyalahgunakan amanat akan mendapatkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya pengurus-pengurus (manajer) yang buruk akan disiksa, berhati-hatilah engkau untuk menjadi mereka (manajer)” (HR Muslim).

Sedangkan menurut Eisenhardt (1989), manusia pada dasarnya lebih mementingkan diri sendiri, memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa datang dan menghindari resiko sehingga menyebabkan informasi yang dihasilkan oleh manusia untuk manusia lainnya dipertanyakan reliabilitasnya dan apakah informasi yang dihasilkan itu dapat dipercaya atau tidak. Oleh karena itu, proses *governance* dapat dikatakan sebagai suatu mekanisme untuk menambah kepercayaan kepada prinsipal agar manajemen dapat bertindak secara jujur dan

untuk mengurangi *agency cost* karena *corporate governance* sangat terkait dengan aspek pengawasan dan akuntabilitas (Darmadi,2013).

2.1.2. Good Corporate Governance

PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Sedangkan, menurut Lannoo (dikutip dari Algaoud dan Lewis, 2003), GCG didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara menyeluruh yang ditetapkan secara internal dan eksternal dari suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders*. Di Indonesia *Good corporate governance* atau yang sering kita kenal dengan tata kelola perusahaan yang baik didefinisikan sebagai (Daniri, 2005, h.8):

“Suatu pola hubungan, sistem dan proses yang digunakan oleh organ perusahaan (Direksi, Dewan Komisaris, RUPS) guna memberikan nilai tambah kepada pemegang saham secara berkesinambungan dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan norma yang berlaku”.

Selanjutnya, Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG,2006) menetapkan lima prinsip *Good Corporate Governance* yang sering kita sebut dengan TARIF, yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi)

Dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi dimana perusahaan tersebut harus menyediakan informasi yang cukup, akurat, dan tepat waktu kepada berbagai pihak yang berkepentingan.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Dapat diartikan sebagai suatu pertanggungjawaban organ perusahaan dimana perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar agar pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Dapat diartikan sebagai suatu kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di dalam pengelolaan perusahaan baik itu dapat mematuhi peraturan yang ada di dalam perusahaan itu sendiri yang sesuai dengan prinsip perusahaan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku agar membantu peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan pendapatan dan kesempatan kerja.

4. *Independency* (Kemandirian)

Dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana perusahaan harus dikelola secara profesional yaitu independen agar tidak terjadi benturan kepentingan dan intervensi dari pihak lain.

5. *Fairness* (Kesetaraan dan Kewajaran)

Dapat didefinisikan sebagai suatu perlakuan yang adil dan setara dalam memperhatikan kepentingan stakeholder yang diharapkan dapat membuat seluruh aset perusahaan dikelola secara baik dan hati-hati sehingga timbul perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham yang jujur dan adil.

2.1.3. Perbankan Syariah

Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya (UU No.21 Tahun 2008). Sedangkan, Bank Syariah menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbedaan antara Bank Umum Syariah dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Umum Syariah dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kegiatan Bank Umum Syariah meliputi:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad *mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad *mudharabah*, akad *musyarakah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *murabahah*, akad *salam*, akad *istishna'* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qardh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad *hawalah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah;
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah; dan
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.4. Corporate Governance di Laporan tahunan

Dalam teori keagenan, biaya agensi timbul karena asimetri informasi yang terjadi antara manajemen (agent) dengan pemegang saham (prinsipal). Manajer bertindak sebagai pengelola perusahaan yang memiliki kontak langsung dengan perusahaan atau memiliki lebih banyak informasi tentang perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham (prinsipal). Oleh karena itu, manajer

berkewajiban untuk mengungkapkan informasi kepada prinsipal mengenai kondisi perusahaan salah satunya yaitu melalui laporan keuangan. Peningkatan dalam mengungkapkan laporan keuangan merupakan salah satu cara untuk mengurangi asimetri informasi.

Menurut Botosan (1997) dalam Darmadi (2013), Laporan tahunan perusahaan dipandang sebagai media utama untuk menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan secara rinci. Laporan tahunan ini dianggap penting karena efektivitasnya dalam menyampaikan citra perusahaan atau pesan tertentu (Preston et al.,1996 dalam Darmadi, 2013). Perusahaan yang memiliki kualitas tinggi dalam mengungkapkan informasi maka dipastikan bahwa perusahaan tersebut telah memasukkan informasi penting dalam laporan tahunan mereka. Informasi mengenai tata kelola perusahaan juga merupakan salah satu informasi yang sangat penting untuk diungkapkan oleh perusahaan. Bhat et al., (2006) berpendapat bahwa pengungkapan tentang struktur tata kelola perusahaan (*corporate governance*) digunakan untuk menilai kredibilitas informasi keuangan, mengurangi ketidakpastian mengenai kinerja perusahaan, dan dapat meningkatkan pemantauan dan pengendalian internal serta mendorong perbaikan pada struktur internal dan proses suatu perusahaan.

Bank Islam yang nampaknya merupakan suatu lembaga keuangan dengan identitas agama, selain menaati ketentuan yang berlaku juga diharapkan untuk dapat mematuhi nilai-nilai etika Islam dalam kegiatan operasi sehari-harinya. Seperti yang dinyatakan oleh Janahi (1995):

“Staf di sebuah bank Islam sepanjang hidupnya harus bertingkah laku secara islami, baik dalam bekerja ataupun bersenang-senang” (dalam Algaoud dan Lewis,2003, h.239).

Pentingnya *corporate governance* yang berlaku pada bank Islam adalah untuk tetap mempertahankan kepercayaan para deposan dan investor yang memerlukan kejujuran dalam hubungan keuangan Islami. Haniffa dan Hudaib (2004, h.5) dalam Darmadi (2013) menyatakan bahwa:

“[...] Salah satu jalan untuk menunjukkan akuntabilitas dan komitmen mereka dalam melayani kebutuhan komunitas Muslim dan masyarakat pada umumnya adalah melalui pengungkapan informasi yang relevan dan dapat diandalkan dalam laporan tahunan mereka.”

2.1.5. Pentingnya *Good Corporate Governance* di Bank Syariah

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan lebih unik dibandingkan dengan sektor-sektor lain dimana mekanisme tata kelola dalam sektor tersebut hanya dimaksudkan untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dan manajer saja. Namun, dalam industri perbankan selain untuk mengelola dan menjaga dana yang disediakan oleh berbagai pihak termasuk para deposan, manajer juga harus menjaga kepercayaan masyarakat itu sendiri.

Jika dilihat dari sudut pandang *corporate governance*, perbankan syariah menunjukkan beberapa segi yang menarik. Archer et al. (dikutip oleh Darmadi,2013) menyebutkan selain mematuhi peraturan perbankan, bank syariah juga harus mematuhi hukum syariah. Algaoud dan Lewis (2003) menyebutkan beberapa prinsip-prinsip Islam yang harus dianut oleh perbankan Islam, diantaranya adalah:

1. Larangan riba dalam berbagai berbagai bentuk transaksi.

2. Menjalankan bisnis dan investasi berdasarkan aktivitas-aktivitas yang halal.
3. Transaksi harus bebas dari unsur *gharar* (spekulasi atau ketidakpastian yang tidak masuk akal).
4. Zakat harus dibayar oleh bank untuk dimanfaatkan masyarakat.
5. Semua aktivitas harus sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, dengan Dewan Syariah Khusus sebagai penyelian dan memberikan nasihat kepada bank mengenai kepatuhan suatu transaksi.

Kelima poin diatas merupakan poin penting yang harus dianut oleh perbankan syariah dimana dari kelima poin diatas, poin pertama yaitu pelarangan riba merupakan sentral dari beberapa poin tersebut. Karena, Islam melarang setiap pembayaran bunga atas berbagai bentuk pinjaman dan atau transaksi. Hal ini dapat dilihat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, sebagai berikut:

Pertama dalam Surat (30) Ar Rum Ayat 39 Allah SWT berfirman:

“Dan suatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan serupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.”

Kedua, Allah SWT berfirman dalam Surat (4) An Nisa' ayat 160-161 sebagai berikut:

“Maka disebabkan karena kezaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta manusia dengan jalan yang batil. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.”

Ketiga dalam Surat (3) Ali Imran ayat 130 Allah SWT berfirman:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.”

Dan terakhir larangan riba dalam Surat (2) Al Baqarah ayat 278-279:

“Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (perintah itu), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Menurut Algaoud dan Lewis (2003) , Ideologi keagamaan Islam akan bertindak sebagai mekanisme insentif untuk mengurangi inefisiensi yang diakibatkan oleh informasi yang asimetri dan resiko moral. Seperti pernyataan Ayoub-Bey (1994) yang dikutip oleh Algaoud dan Lewis (2003, h.245):

“Perbankan Islam memiliki keunggulan intrinsik dalam hal (etika) ini karena Islam, melalui syariatnya mendorong dan mengharuskan kalangan industri, untuk terlibat dalam (dan memudahkan) perdagangan yang bertanggungjawab secara sosial, moral dan etika. Yang lebih penting dipandang dari sudut perkembangan-perkembangan ini adalah bahwa para praktisi perbankan Islam sekarang bersikap lebih proaktif dalam memajukan perilaku praktik yang beretika.”

Oleh karena itu, bank-bank tersebut lebih terkena resiko ketidakpatuhan. Survei Chapra dan Ahmed dalam Darmadi (2013) menunjukkan bahwa sebagian besar deposit bank syariah siap untuk menarik dana mereka jika bank-bank tersebut gagal untuk beroperasi sesuai dengan aturan syariah.

2.1.6. Mekanisme *Good Corporate Governance* di Bank Syariah

Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah diharuskan untuk menerapkan tata kelola yang baik mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sejalan dengan *Code of GCG*, Bank Indonesia juga mengharuskan bank syariah untuk menyusun laporan tentang pelaksanaan *corporate governance* pada akhir laporan keuangan tahunan. Berdasarkan penelitian sebelumnya Darmadi (2013) mengidentifikasi sebanyak 7 point item pengungkapan yang terdiri dari Dewan Pengawas Syariah; Dewan Komisaris; Direksi; Dewan Komite; Pengendalian internal dan audit eksternal; Manajemen Resiko; dan pernyataan penerapan *Good Corporate Governance*. Tujuh point item tersebut memuat 71 item pengungkapan yang digunakan untuk melihat sejauh mana perbankan syariah telah mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance* dalam laporan tahunan.

2.1.7. Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate Governance*

2.1.7.1. Diversitas anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Pengertian diversitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, didefinisikan sebagai perbedaan, kelainan, dan keragaman. Mathis dan Jackson (2001) dalam Toyyibah (2012) menyebutkan bahwa diversitas mengacu pada

perbedaan antara anggota dari sebuah kelompok organisasi, sebuah bangsa atau dunia. Sedangkan, definisi diversitas dalam konteks *corporate governance* menurut Vander Walt dan Ingley (2003) dalam Basundari dan Arthana (2013) mendefinisikan diversitas sebagai komposisi dewan komisaris dan direksi dan kombinasi dari kualitas, karakteristik serta keahlian yang berbeda antara individu anggota dewan dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan dan proses lainnya dalam dewan perusahaan. Dapat disimpulkan bahwa diversitas merupakan suatu perbedaan dan variasi atribut yang dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi dari segi fisik, sosial, kultural dan lain sebagainya. Mohammed Nor Raihan (2011) dalam Toyyibah (2013) menyebutkan bahwa keahlian, kepribadian, *learning style*, pendidikan, usia, etika, *gender*, etnisitas, masa jabatan, pengalaman, dan status ekonomi atau sosial merupakan contoh dari diversitas dewan komisaris dan dewan direksi. Keragaman direksi akan meningkatkan nilai pemegang saham (Sudiartana, 2013). Menurut Robinson dan Deschant (1997), Gomez-Meijia (2001), dan Carter et al (2007) mengemukakan bahwa diversitas perusahaan memberikan beberapa keuntungan untuk perusahaan, yaitu:

1. Diversitas memperbaiki proses pengambilan keputusan dewan perusahaan yang disebabkan karena perspektif baru yang unik dan kreatifitas yang meningkat. Meskipun diversitas menghasilkan lebih banyak konflik dalam proses pengambilan keputusan, namun dengan adanya berbagai perspektif yang muncul menyebabkan pembuat keputusan mengevaluasi lebih banyak alternatif dan lebih berhati-hati atas konsekuensi dari alternatif yang diberikan.

2. Diversitas memperbaiki kemampuan dewan perusahaan dalam memonitor manajer.
3. Diversitas meningkatkan kreatifitas dan inovasi dimana sikap, fungsi kognitif, dan kepercayaan tidak terdistribusi secara acak dalam populasi tetapi cenderung bervariasi secara sistematis sesuai dengan variabel demografi seperti umur, ras dan *gender*.
4. Adanya diversitas informasi yang disediakan untuk manajemen.
5. Diversitas dewan mendorong hubungan global yang lebih efektif.
6. Diversitas dewan perusahaan memberikan legitimasi pada perusahaan dengan pihak-pihak eksternal dan internal.

Teori keagenan berfokus pada peran dewan dalam mengendalikan dan mengawasi perilaku eksekutif sehingga dengan adanya diversitas pada dewan perusahaan maka masing-masing anggota dewan akan memberikan kumpulan dari pengalaman, *attachment*, dan pandangan yang berbeda-beda bagi dewan dalam mengelola perusahaan dan mengungkapkan informasi.

2.1.7.1.1. Diversitas *Gender*

Women's Studies Encyclopedia mendefinisikan *gender* sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Mulia, 2004: 4 dalam Marzuki). Dimana perbedaan *gender* sering diartikan sebagai ketentuan Tuhan yang bersifat kodrati atau bersifat biologis yang seolah-olah tidak dapat diubah lagi. Padahal *gender* juga dapat menentukan

pengalaman hidup seseorang yang artinya bahwa *gender* akan menentukan kemampuan seseorang untuk membuat keputusan dan bertindak secara otonom.

Diversitas *gender* dalam penelitian ini diproksi dengan keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi. Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi. Wanita di nilai memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari resiko, dan lebih teliti dibandingkan dengan pria (Kusumastuti, 2006). Selain itu wanita pada umumnya cenderung menganalisis masalah-masalah sebelum membuat suatu keputusan dan mengolah keputusan yang telah dibuat sehingga menghasilkan pertimbangan masalah serta alternatif penyelesaian yang lebih seksama (Robbins dan Judge, 2008:206 dalam Basundari dan Arthana, 2013). Dengan adanya keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan diharapkan dapat mendorong pengungkapan informasi yang lebih luas dan transparan. Earley dan Mosakowski (2000) dalam Toyyibah (2012) berpendapat bahwa perempuan dianggap memiliki kemampuan untuk memfasilitasi penyebaran informasi.

Brammer et al. (2007) dalam Basundari dan Arthana (2013) berpendapat bahwa dalam perspektif bisnis mengenai argumen kesetaraan kesempatan bagi wanita fokus pada fakta bahwa keberadaan wanita dalam dewan perusahaan adalah suboptimal bagi perusahaan. Wanita dianggap sulit untuk memperoleh kursi dalam komisaris dan direksi karena mereka harus menghadapi

berbagai tantangan sehingga apabila wanita berada dalam jajaran dewan perusahaan merupakan suatu kehormatan bagi wanita (Krishnan dan Park, 2005).

Salah satu upaya dalam menanggulangi berbagai macam bentuk diskriminasi pada kaum wanita, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa kesetaraan *gender* adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

2.1.7.1.2. Diversitas Latar Belakang Pendidikan

Latar belakang pendidikan formal dewan komisaris dan direksi merupakan karakteristik kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan dalam pengambilan keputusan bisnis dan mengelola perusahaan (Kusumastuti, 2006 dalam Sudiartana, 2013). Ponnu (2008) berpendapat bahwa *Board of Directors* seharusnya terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian dalam bidang hukum, perpajakan, akuntansi dan keuangan, dan lainnya sehingga memberikan perspektif yang bermanfaat terhadap penilaian resiko, keunggulan bersaing, dan pemahaman mengenai tantangan yang dihadapi dalam bisnis. Sedangkan Alhabsi (1994) dalam Suhardjanto (2010) menyatakan bahwa karakteristik personal seorang komisaris mempengaruhi praktik *disclosure*. Senada dengan Alhabsi, Wallace dan Cook (1990) dalam Yuniarsih (2011)

menyatakan bahwa anggota direksi yang memiliki latar belakang akuntansi dan bisnis mungkin melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas untuk meningkatkan citra perusahaan maupun kredibilitas manajemen.

Seiring dengan perubahan waktu maka perusahaan dalam memilih anggota dewan perusahaan juga berdasarkan pada latar belakang pendidikan dewan komisaris dan direksi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan agar anggota dewan perusahaan dapat melaksanakan fungsinya secara efektif.

2.1.7.2. Kepemilikan *Blockholder*

Menurut Mursalim (2009) struktur kepemilikan merupakan suatu perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh pihak dalam atau manajemen perusahaan dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak luar. Dalam kepemilikan saham terdapat istilah *blockholder ownership* atau kepemilikan *blockholder* dan kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial (Jensen dan Meckling, 1976) dan kepemilikan *blockholder* (Kaplan dan Minton, 1994) dalam Eng dan Mak (2003) merupakan dua mekanisme *governance* yang mengurangi masalah keagenan.

Kepemilikan *blockholder* mengacu pada entitas yang memegang lebih dari lima persen dari saham perusahaan yang beredar. Marston dan Polei (2004) dalam Samaha,dkk (2011) berpendapat bahwa investor yang hanya memiliki sebagian kecil saham perusahaan memiliki akses yang terbatas ke informasi tentang perusahaan. Sehingga dengan adanya kepemilikan saham yang lebih

tersebar maka perusahaan akan mengungkapkan informasi yang luas untuk memenuhi kebutuhan investor dan untuk mengawasi tindakan manajer.

2.1.7.3. Profitabilitas

Profitabilitas menggambarkan kinerja perusahaan atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dimana perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi lebih cenderung mengungkapkan lebih banyak informasi. Meningkatnya profitabilitas suatu perusahaan dapat disebabkan oleh meningkatnya sumber pendanaan dalam menjalankan aktivitas bisnis.

Meningkatnya sumber pendanaan ditandai dengan meningkatnya jumlah dan ragam pemangku kepentingan yang mempercayakan sebagian hartanya untuk diinvestasikan pada bank tersebut. Oleh karena itu, dengan peningkatan jumlah dan ragam pemangku kepentingan harus disertai dengan pengungkapan informasi mengenai *corporate governance*. Informasi ini digunakan sebagai respon tanggungjawab perusahaan terhadap penggunaan dana pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya investor terhadap kinerja perusahaan. Selain itu, manajemen juga ingin meyakinkan kepada investor atau prinsipal mengenai profitabilitas yang dicapai oleh perusahaan agar mereka meningkatkan kompensasi untuk manajemen sehingga dengan adanya peningkatan kompensasi yang diberikan sebagai apresiasi terhadap pencapaian profitabilitas perusahaan manajemen melakukan pengungkapan yang lebih luas (Hikmah,2011). Dalam penelitian ini profitabilitas diproksikan dengan menggunakan ROE (*Return On Equity*) yang merupakan perbandingan laba setelah pajak dengan total ekuitas.

2.2. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian mengenai *corporate governance* telah banyak dilakukan di Indonesia maupun diluar negeri. Berikut beberapa penelitian-penelitian terdahulu mengenai pengungkapan *corporate governance*: Darmadi (2013) meneliti tentang Praktik Pengungkapan *Corporate Governance: Exploratory Study* dalam Laporan Tahunan Bank Islam. Studi eksplorasi pada tata kelola perusahaan bank syariah berdasarkan informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan perusahaan, masih relatif langka dalam literatur (Darmadi, 2013). Penelitian tersebut menggunakan tujuh sampel bank syariah yang mempublikasikan laporan tahunan bank pada website mereka di tahun 2010. Pemilihan sampel tersebut dipilih berdasarkan tingkat karakteristik perusahaan dan struktur kepemilikan. Tujuh sampel tersebut adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Victoria Syariah, BCA Syariah dan BJB Syariah. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri menunjukkan tingkat transparansi perusahaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan bank syariah lainnya, khususnya dalam hal pengungkapan *corporate governance*.

Bank Muamalat mencapai indeks dimensi yang sempurna (1.00) untuk Dewan Komisaris dan Direksi, sedangkan pada Bank Syariah Mandiri sangat baik dalam mengungkapkan ukuran Direksi dan penerapan tata kelola perusahaan. Ukuran variabel Dewan Komisaris dan Direksi yaitu deskripsi anggota Dewan (nama, jabatan, gambar, dan profil), tugas dan tanggungjawab, jumlah rapat Dewan dan jumlah kehadiran Dewan dalam rapat, kepemilikan saham serta

remunerasi untuk anggota Dewan. Sedangkan, Bank Syariah Bukopin dan BJB Syariah menempati posisi terbawah dalam praktik pengungkapan *corporate governance*. BJB Syariah merupakan salah satu bank komersial Islam yang baru didirikan di Indonesia pada tanggal 31 Desember 2010 yang mana dalam laporan tahunannya tidak ada satupun yang diungkapkan mengenai Dewan Komite mereka. Tetapi anehnya, dalam pengungkapan ukuran manajemen resiko BJB Syariah menempati posisi kedua setelah Bank Muamalat. Sebagai salah satu bank komersial Islam yang baru didirikan bisa dikatakan bahwa meskipun bank tersebut baru dipasaran, bank tersebut sadar akan resiko yang akan dihadapinya dan telah siap untuk menghadapi resiko-resiko yang akan menerpa bank tersebut. Karena, dengan menerapkan manajemen resiko yang sehat akan menjamin para pemangku kepentingan bahwa bank telah memiliki kesiapan untuk menghadapi ketidakpastian masa depan dan memiliki modal yang cukup untuk mengurangi resiko. Darmadi (2013) juga menyebutkan Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan BCA Syariah telah melaksanakan *self-assessments* pada praktek GCG mereka dimana hal tersebut berguna untuk meyakinkan para *stakeholder* bahwa bank telah melakukan apa yang telah diwajibkan oleh regulator.

Selain Darmadi (2013), terdapat penelitian mengenai Faktor-Faktor Penentu Pengungkapan Sukarela *Corporate Governance* di Mesir oleh Samaha,dkk (2011). Samaha,dkk (2011) menemukan adanya pengaruh negatif kepemilikan *blockholder* terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan. Namun, pada variabel komposisi dewan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *corporate governance*. Hal tersebut berbanding terbalik

dengan variabel peran dualitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dualitas ini berpengaruh negatif terhadap pengungkapan *corporate governance*. Dengan merangkap jabatan menyebabkan fungsi kontrol tidak berjalan efektif. Berbeda dengan lingkungan kelembagaan di Indonesia, dimana peran dualitas tersebut tidak dapat diterapkan di Indonesia karena Indonesia mengadopsi struktur *two-tier board* yaitu pemisahan antara fungsi, tugas dan wewenang direktur eksekutif dan direktur non eksekutif.

Hikmah, dkk (2011) meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Variabel yang diuji yaitu ukuran perusahaan, umur listing perusahaan, kepemilikan dispersi, profitabilitas, dan ukuran Dewan Komisaris. Hasil penelitian menyebutkan bahwa kepemilikan dispersi dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perusahaan perbankan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa semakin terdispersi struktur kepemilikan saham tidak menjamin adanya pengungkapan *corporate governance* yang luas. Kemudian arah hubungan yang negatif pada variabel profitabilitas menunjukkan bahwa ketika perusahaan menghadapi penurunan dalam profitabilitasnya, maka pengungkapan *corporate governance* cenderung lebih luas untuk membuat perusahaan terlihat lebih baik dan mencoba untuk mengurangi tekanan pasar (Kusumawati, 2006 dalam Hikmah, 2011).

Sudiartana (2013) meneliti tentang pengaruh diversitas *gender* dan latar belakang pendidikan dewan direksi terhadap luas pengungkapan sukarela pada perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di BEI sebagai sampel penelitiannya. Hasil menunjukkan bahwa diversitas *gender* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dan latar belakang pendidikan anggota dewan berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. Diversitas *gender* dalam penelitian tersebut tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dikarenakan proporsi wanita dalam jajaran dewan dalam penelitian masih tergolong kecil (minoritas) sehingga tidak memiliki hak suara mayoritas dalam menentukan keputusan yang dibuat dewan terkait dengan luas pengungkapan sukarela. Tidak hanya keberadaan wanita dalam jajaran dewan tetapi juga terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan diantaranya adalah pengalaman, ras, dan umur.

Toyyibah (2012) meneliti tentang pengaruh karakteristik diversitas komisaris dan direksi terhadap kinerja keuangan. Hasil menunjukkan bahwa keberadaan wanita dan keberadaan kebangsaan asing dalam jajaran dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Sedangkan untuk umur dewan komisaris dan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja yang diukur dengan menggunakan ROA dan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan PBV. Berbanding terbalik dengan umur, masa jabatan dewan komisaris dan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA dan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan PBV.

Ringkasan penelitian terdahulu mengenai pengungkapan *corporate governance* dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

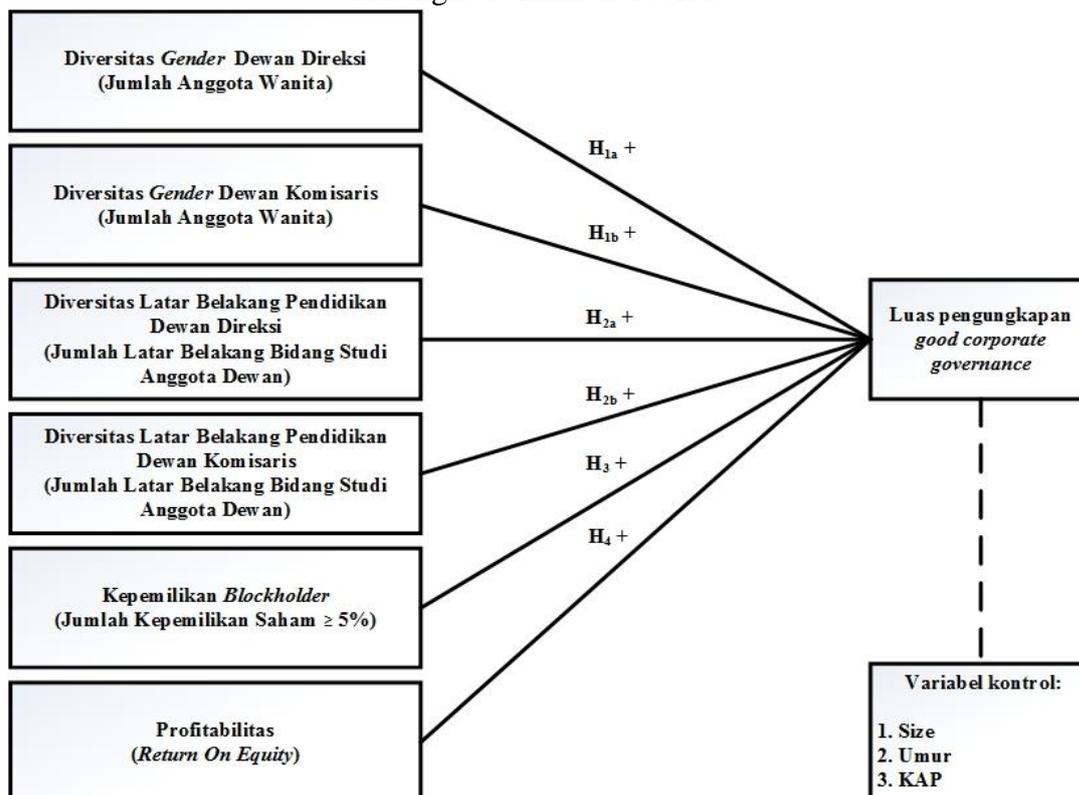
No.	Penelitian	Variabel dependen	Variabel Independen	Data	Teknik Analisis	Hasil
1	Samaha, dkk (2011)	Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	Komposisi dewan, dualitas CEO, kepemilikan manajerial, kepemilikan <i>blockholder</i> dan komite audit	Perusahaan yang terdaftar di Egyptian Stock Exchange (EGX) tahun 2009	OLS (<i>Ordinary Least Squares</i>)	Menemukan adanya pengaruh komposisi dewan, dualitas CEO, kepemilikan <i>blockholder</i> , Komite audit terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> . Tidak menemukan adanya pengaruh antara ukuran dewan, kepemilikan manajerial dan jumlah pemegang saham dengan luas pengungkapan perusahaan
2	Hikmah, dkk (2011)	Luas Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	Ukuran perusahaan, umur, listing, kepemilikan dispersi	Perbankan yang terdaftar di bursa efek Indonesia 2007-2008	Regresi Berganda	Menemukan adanya pengaruh antara ukuran perusahaan, umur listing, ukuran dewan komisaris terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> . Tidak menemukan adanya pengaruh kepemilikan dispersi dan profitabilitas dengan luas pengungkapan <i>corporate governance</i>
3	Toyyibah (2012)	Kinerja Keuangan	Diversitas <i>gender</i> , kewarganegaraan asing, usia, jabatan	Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010	OLS (<i>Ordinary Least Squares</i>)	Menemukan adanya pengaruh antara Diversitas <i>gender</i> dan kewarganegaraan asing terhadap kinerja. Tidak menemukan adanya pengaruh usia BOC dan BOD terhadap ROA namun memiliki pengaruh terhadap PBV. Menemukan adanya pengaruh antara jabatan BOC dan BOD terhadap ROA tetapi tidak memiliki pengaruh terhadap PBV
4	Sudiartana (2013)	Luas Pengungkapan Sukarela	Diversitas <i>gender</i> dan latar belakang	Perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2007-2008	Regresi	Diversitas <i>gender</i> tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> . Menemukan adanya pengaruh antara diversitas latar belakang pendidikan terhadap luas pengungkapan <i>corporate governance</i> .

Sumber: Data dari berbagai jurnal (2014)

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan penelitian terdahulu yang sudah diuraikan, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah terdapat indikator dalam suatu perbankan syariah yaitu diversitas *gender*, latar belakang pendidikan, kepemilikan *blockholder*, dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam laporan tahunan perbankan syariah di Indonesia. Kerangka penelitian ini digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran Teoritis



2.4. Hipotesis

2.4.1. Diversitas *gender*

Teori keagenan berfokus pada peran dewan dalam mengendalikan dan mengawasi perilaku eksekutif sehingga dengan adanya diversitas pada dewan

perusahaan maka masing-masing anggota dewan akan memberikan kumpulan dari pengalaman, *attachment*, dan pandangan yang berbeda-beda bagi dewan dalam mengelola perusahaan dan mengungkapkan informasi.

Keberadaan wanita dalam jajaran dewan komisaris dan direksi menandakan bahwa perusahaan memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang tanpa ada diskriminasi. Wanita dinilai memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari resiko, dan lebih teliti dibandingkan dengan pria sehingga akan mengungkapkan informasi lebih banyak kepada pemegang saham (Wagland dan Taylor, 2009 dalam Sudiarthana, 2013). Dibandingkan dengan pria yang mana memiliki kewajiban yang lebih besar dalam hal pencapaian ke arah materi lebih cenderung adanya tindakan oportunistik yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Krishnan dan Park (2005) dalam Toyyibah (2012) berpendapat bahwa keberadaan wanita dalam jajaran dewan perusahaan merupakan suatu kehormatan bagi wanita. Karena wanita dianggap sulit untuk memperoleh kursi dalam komisaris dan direksi dimana mereka harus menghadapi berbagai tantangan.

Hasil penelitian Toyyibah (2012) dan Sudiartana (2013), menunjukkan bahwa diversitas *gender* tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja dan luas pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{1a} : Diversitas *gender* Direksi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

H_{1b} : Diversitas *gender* Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.2. Diversitas latar belakang pendidikan

Struktur dewan dalam perusahaan di Indonesia menganut sistem *two tier* yaitu memisahkan fungsi dan tanggungjawab dewan direksi dan dewan komisaris. Dalam sistem tersebut Direksi sebagai pengelola perusahaan yang memiliki tanggungjawab dalam membuat keputusan-keputusan yang akan mempengaruhi arah kebijakan perusahaan. Sedangkan, dewan komisaris sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham atau pemilik. Hambrick dan Marson (1984) dalam Sudiartana (2013) menyatakan bahwa hasil perusahaan yang meliputi pilihan-pilihan strategis dan tingkat kinerja salah satunya dipengaruhi oleh karakteristik latar belakang pendidikan direksi.

Latar belakang pendidikan formal dewan komisaris dan direksi merupakan karakteristik kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan dalam pengambilan keputusan bisnis dan mengelola perusahaan (Kusumastuti, 2006 dalam Sudiartana, 2013). Wallace dan Cook (1990) dalam Yuniarsih (2011) menyatakan bahwa anggota direksi yang memiliki latar belakang akuntansi dan bisnis mungkin melakukan tingkat pengungkapan yang lebih luas untuk meningkatkan citra perusahaan maupun kredibilitas manajemen.

Hasil penelitian Sudiartana (2013), menunjukkan bahwa diversitas *gender* tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dan latar belakang

pendidikan anggota dewan berpengaruh positif pada luas pengungkapan sukarela. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H_{2a} : Diversitas latar belakang pendidikan direksi berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

H_{2b} : Diversitas latar belakang pendidikan dewan komisaris berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.3. Kepemilikan *Blockholder*

Kepemilikan *blockholder* mengacu pada entitas yang memegang lebih dari lima persen dari saham perusahaan yang beredar. La Porta et al.(1998) berpendapat bahwa pemegang blok saham perusahaan atau pemegang saham pengendali dapat mengurangi masalah agensi antara agent dengan prinsipal. Marston dan Polei (2004) dalam Samaha,dkk berpendapat bahwa investor yang hanya memiliki sebagian kecil saham perusahaan memiliki akses yang terbatas ke informasi tentang perusahaan. Dengan adanya kepemilikan saham yang lebih tersebar maka perusahaan akan mengungkapkan informasi yang luas untuk memenuhi kebutuhan investor.

Samaha,dkk (2011) menemukan persentase kepemilikan *blockholder* yang lebih rendah berpengaruh negatif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃: Kepemilikan *blockholder* berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

2.4.4. Profitabilitas

Dengan meningkatnya jumlah dan ragam pemangku kepentingan maka perusahaan akan mengungkapkan informasi mengenai *corporate governance* yang lebih luas. Informasi tersebut digunakan sebagai respon tanggungjawab perusahaan terhadap penggunaan dana pemangku kepentingan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan para pemangku kepentingan, khususnya investor terhadap kinerja perusahaan. Dengan adanya peningkatan kompensasi yang diberikan sebagai apresiasi terhadap pencapaian profitabilitas perusahaan, manajemen akan melakukan pengungkapan yang lebih luas (Hikmah,2011).

Penelitian Hikmah,dkk (2011) hasil menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan *corporate governance*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan *corporate governance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan variabel dependen dan independen. Luas Pengungkapan GCG merupakan variabel dependen dan diversitas dewan komisaris dan direksi, kepemilikan *blockholder* dan profitabilitas sebagai variabel independen.

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah luas pengungkapan *good corporate governance* (GCG). *Corporate Governance* didefinisikan sebagai sistem hak, proses, dan kontrol secara menyeluruh yang ditetapkan secara internal dan eksternal dari suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk melindungi kepentingan semua *stakeholders*.

Variabel luas pengungkapan *corporate governance* pada laporan tahunan perbankan syariah diukur dengan Indeks Pengungkapan *Corporate Governance* (IPCG) sebagai standar untuk mengukur tingkat pengungkapan *corporate governance* pada perbankan syariah di Indonesia. Indeks pengungkapan *corporate governance* dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Darmadi,2013):

$$\text{IPCG} = \frac{\text{Total item yang diungkapkan perusahaan}}{\text{skor maksimal yang mungkin diperoleh perusahaan}} \times 100 \%$$

3.1.2. Variabel Independen

3.1.2.1. Diversitas dewan komisaris dan direksi

3.1.2.1.1. Diversitas *gender*

Women's Studies Encyclopedia mendefinisikan *gender* sebagai suatu konsep kultural yang dipakai untuk membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Siti Musdah Mulia, 2004: 4 dalam Marzuki)

Diversitas *gender* diproksikan dengan keberadaan wanita sebagai anggota dewan komisaris dan direksi. Keberadaan wanita sebagai anggota dewan komisaris dan direksi diukur dengan persentase jumlah wanita yang ada pada jajaran dewan direksi atau komisaris dibandingkan dengan jumlah seluruh anggota dewan direksi. (Sudiartana, 2013)

diversitas gender

$$= \frac{\text{jumlah gender wanita di jajaran dewan direksi atau dewan komisaris}}{\text{jumlah anggota dewan direksi atau dewan komisaris}} \times 100\%$$

3.1.2.1.2. Diversitas latar belakang pendidikan

Latar belakang pendidikan formal dewan komisaris dan direksi merupakan karakteristik kognitif yang dapat mempengaruhi kemampuan dewan dalam pengambilan keputusan bisnis dan mengelola perusahaan (Kusumastuti, 2006 dalam Sudiartana, 2013).

Latar belakang pendidikan dewan diukur dengan terlebih dahulu mengelompokkan latar belakang pendidikan menjadi beberapa bidang, yaitu ekonomi dan bisnis, hukum, teknik, sosial dan politik, pertanian, mipa, dan teknologi informatika(Ponnu,2008;Sudiartana,2013). Kemudian membandingkan persentase jumlah latar belakang pendidikan dewan direksi atau dewan komisaris dengan total latar belakang pendidikan dewan direksi dan dewan komisaris yang sudah dikelompokkan.

3.1.2.2. Kepemilikan *Blockholder*

Kepemilikan *blockholder* diwakili oleh persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang kepemilikannya $\geq 5\%$ dari jumlah saham yang diterbitkan (Samaha,dkk 2011; Kelton dan Yang,2008; Eng dan Mak, 2003).

3.1.2.3. Profitabilitas

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba (profit) yang akan menjadi dasar pembagian deviden. Dalam penelitian ini profitabilitas diprosikan dengan menggunakan ROE (*Return On Equity*).

$$\text{ROE (Return On Equity)} = \frac{\text{laba setelah pajak}}{\text{total ekuitas}}$$

3.1.3. Variabel Kontrol

3.1.3.1. Umur

Umur listing perusahaan diukur menggunakan umur perusahaan yang merupakan selisih antara tahun sampel dengan tahun *first issue* (Bhuiyan dan Biswas,2007).

3.1.3.2. Size

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan. Variabel ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan total aset yang menggambarkan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan. Total aset kemudian diubah ke dalam bentuk logaritma natural (Bhuiyan dan Biswas, 2007; Hikmah,dkk 2011; Putranto, 2013).

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Ln Total Aset}$$

3.1.3.3. Kantor Akuntan Publik

Auditor eksternal diperlukan oleh perusahaan untuk pernyataan pendapatnya mengenai kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian suatu laporan keuangan perusahaan dengan standar akuntansi keuangan Indonesia. Variabel KAP diukur dengan membandingkan jumlah perusahaan yang menggunakan jasa kantor akuntan publik *big four* dengan jumlah kantor akuntan publik *big four*.

Tabel 3.1
Tabel Definisi Operatif Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
Luas Pengungkapan <i>Good Corporate Governance</i> (Y)	Indeks Pengungkapan <i>Corporate Governance</i>	jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan dibagi total item	Skala Rasio
<i>female</i> di jajaran Dewan Direksi (X1a)	diversitas <i>gender</i> keberadaan wanita dalam anggota dewan direksi	Persentase jumlah anggota wanita dalam jajaran dewan direksi	Skala Rasio
latar belakang pendidikan dewan direksi (X2a)	diversitas latar belakang pendidikan anggota dewan direksi	persentase jumlah latar belakang pendidikan dewan direksi	Skala Rasio
<i>female</i> di jajaran dewan komisaris (X1b)	diversitas <i>gender</i> keberadaan wanita dalam anggota dewan komisaris	persentase jumlah anggota wanita dalam jajaran dewan komisaris	Skala Rasio
latar belakang pendidikan dewan komisaris (X2b)	diversitas latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris	persentase jumlah latar belakang pendidikan dewan komisaris	Skala Rasio
kepemilikan <i>Blockholder</i> (X3)	kepemilikan saham	persentase kepemilikan saham lebih dari 5%	Skala Rasio
profitabilitas (X4)	<i>return on equity</i>	laba setelah pajak dibanding dengan total ekuitas	Skala Rasio
ukuran perusahaan (X5)	total asset	logaritma natural total asset	Skala interval
UMUR (X6)	umur listing perusahaan	selisih antara tahun sampel dengan tahun <i>first issue</i>	Skala interval
KAP (X7)	kantor akuntan publik <i>big four</i>	persentase jumlah kap <i>big four</i> yang digunakan	Skala Rasio

Sumber : Dari berbagai jurnal

3.2. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdapat di Indonesia pada tahun 2008-2012. Digunakannya Bank Umum Syariah sebagai sampel karena Bank Umum Syariah berdiri sendiri yang bukan merupakan unit

kerja dari Bank Konvensional seperti Unit Usaha Syariah. Teknik pengambilan data dilakukan secara *pooling*. *Pooling* data atau Data Panel merupakan kombinasi dari data *time series* dan data *cross section*. Metode pengambilan data ini dipilih dikarenakan terbatasnya jumlah Bank Umum Syariah serta data yang tersedia pada periode 2008-2012.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data-data yang telah tersedia, selanjutnya dilakukan proses analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang diperlukan adalah data sekunder yaitu *Annual Report* pada periode 2008-2012. Data diperoleh dari publikasi dalam situs masing-masing Bank Umum Syariah.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini sejumlah 40 sampel data yang dikumpulkan dari laporan tahunan Bank Umum Syariah selama periode tahun 2008-2012 yang bisa dilihat pada situs masing-masing bank sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa *Annual report* bank. Data *Annual report* untuk tahun 2008-2012 yang disediakan di masing-masing situs Bank Umum Syariah.

3.5. Metode Analisis Data

3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011), statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan kemencengan distribusi (*skewness*).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis untuk mengetahui pengaruh independen terhadap variabel dependen, maka diadakan pengujian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi dan uji normalitas.

3.5.2.1. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antarvariabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antarsesama variabel independen sama dengan nol. Menurut Ghozali (2011), untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi biasanya dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor (VIF)*, dengan dasar pengambilan keputusan sebagai berikut :

1. Jika nilai *tolerance* di atas 0,1 dan nilai *VIF* di bawah 10, maka tidak terjadi masalah multikolonieritas, artinya model regresi tersebut baik.

2. Jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,1 dan nilai VIF di atas 10, maka terjadi masalah multikoloniaritas, artinya model regresi tersebut tidak baik.

3.5.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi tidak terjadi kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varian dari residual satu pengamatan tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, dan pada penelitian ini diuji dengan melihat grafik *Scatterplot*. Dasar analisis uji heteroskedastisitas adalah sebagai berikut (Ghozali,2011):

1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.

Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin Watson (DW Test). Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first order autocorrelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel bebas (independen).

3.5.2.4. Uji Normalitas

Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya memiliki distribusi normal atau tidak (Ghozali,2011). Model regresi yang baik adalah yang memiliki data berdistribusi normal. Untuk menguji apakah terdapat distribusi yang normal atau tidak dalam model regresi, maka digunakanlah uji *Kolmogorov-Smirnov* dan analisis grafik. Dalam analisis grafik, dasar pengambilan keputusan dengan melihat grafik histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
2. Jika data menyebar jauh dari diagonal dan/atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

Dalam uji *Kolmogorov-Smirnov Z* (1-sample K-S), dasar pengambilan keputusan untuk pengujian ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) kurang dari 0,05, maka H_0 ditolak. Hal ini berarti data residual terdistribusi tidak normal.
2. Apabila nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima. Hal ini berarti data residual terdistribusi normal.

3.5.3. Analisis Regresi Berganda

Metode analisis data yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara diversitas *gender* dan latar belakang pendidikan komisaris dan direksi, kepemilikan *blockholder*, dan profitabilitas terhadap luas pengungkapan *corporate governance* adalah regresi berganda. Model yang digunakan untuk menguji pengaruh variabel-variabel independen terhadap luas pengungkapan *corporate governance* dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

$$\text{IPCG} = \alpha + \beta_1_{\text{FDIR}} + \beta_2_{\text{LPENDIR}} + \beta_3_{\text{FKOM}} + \beta_4_{\text{LPENKOM}} + \beta_5_{\text{KBLOCK}} + \beta_6_{\text{ROE}} + \beta_7_{\text{SIZE}} + \beta_8_{\text{UMUR}} + \beta_9_{\text{KAP}} + \varepsilon$$

Keterangan :

IPCG = *Corporate governance disclosure*

FDIR = *Female* di Jajaran Direksi

FKOM = *Female* di Jajaran Dewan Komisaris

LPENDIR = Latar Belakang Pendidikan Direksi

LPENKOM = Latar Belakang Pendidikan Dewan Komisaris

KBLOCK = Kepemilikan *Blockholder*

ROE = *Return on Equity*

SIZE = Ukuran perusahaan

UMUR = Umur perusahaan

KAP = Kualitas Audit

3.5.4. Uji Hipotesis

3.5.4.1. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) bertujuan untuk menguji tingkat keeratan atau keterikatan antara variabel dependen dan variabel independen yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinan determinasi (*adjusted R-square*). Nilai *R-Square* yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu artinya variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan dalam memprediksi variabel dependen (Ghozali,2011).

3.5.4.2. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji Statistik F ini bertujuan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali,2011). Pengujian dapat dilakukan dengan melihat tingkat signifikansi F pada output hasil regresi dengan level significant 5%. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 5% maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan), artinya secara simultan variabel-variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 5% maka hipotesis diterima. Hal ini berarti

bahwa secara simultan variabel-variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

3.5.4.3. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara signifikan. Cara melakukan uji t adalah dengan membandingkan t hitung dengan t table pada derajat kepercayaan 5%. Pengujian ini menggunakan kriteria $H_0:\beta=0$ artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. $H_0:\beta\neq 0$ artinya ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima dan H_1 ditolak. Dan sebaliknya, jika t hitung lebih besar t tabel maka H_0 ditolak dan H_1 diterima (Ghozali,2011).